

Peranan Perbankan Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan

ADITYA PRAMUDIA

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the role of banks for the development of Microfinance Institutions in Medan and to determine whether financial aid (loans) from banks to Microfinance Institutions have significant effect on increasing profit Microfinance Institutions in Medan. The study was conducted at Microfinance Institute and Banking contained in Medan. The samples used were a total of 18 MFIs and banks of a number of banks and MFIs. Years of observation time series data is the year 2008 up to 2010. This study uses indicators Banking Disbursement as the independent variable (X) and Operating Profit Microfinance Institutions as the dependent variable (Y). The collected data were analyzed by the method of data analysis to prior classical assumption test before testing the hypothesis. Testing the hypothesis in this study using simple linear regression with partial t test with a significance level of 5%. The conclusion of this study is the role that banks have an insignificant role impact on the development of Microfinance Institutions in Medan. It is based on the number of average granting loans to Microfinance Institutions in Medan at 16.88%. Average number of operating profits of Microfinance Institutions just only 13.04%. The results of the t test showed a significance value of 0.715 which is greater than the value of alpha at 0,05. The results of the determinant test calculations are only 0.3% of distribution banking funds variable can explain operating profit of Microfinance Institutions in Medan, while the remaining 99.7% is explained by other variables not included in this research model.

Keywords : Role, Banking, MFI, Union, Medan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, tentunya masih bermasalah dengan tingkat pengangguran yang memicu tingkat kemiskinan. Inflasi yang tinggi akan menjadikan banyak perusahaan – perusahaan akan gulung tikar, sehingga pengangguranpun menjadi meningkat. Peningkatan pengangguran akan memberikan kontribusi terhadap kemiskinan yang sangat signifikan.

Bukan hanya Indonesia yang mengalami ini, tetapi seluruh negara berkembang di dunia. Sehingga oleh PBB dalam United Nation Summit 1990 yang secara bersama – sama melakukan penanggulangan kemiskinan dengan melaksanakan program MDG's (*Milenium Development Gold*), dimana program ini memfokuskan diri untuk melakukan penghentasan kemiskinan yang diperkirakan sebanyak 1,2 miliar penduduk seluruh dunia. Program ini diupayakan untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 600 juta penduduk pada tahun 2015, dengan cara mengembangkan lembaga keuangan mikro (LKM). Pengembangan lembaga keuangan mikro ini dilakukan dengan memaksimalkan peran perbankan.

Program restrukturisasi perbankan yang telah berjalan sejak awal tahun 1998 telah membuahkan hasil yang cukup baik, tetapi fungsi intermediasi perbankan belum berjalan secara normal (Burhanuddin, 2006:226). Indikator yang digunakan tentang kurang maksimalnya fungsi intermediasi perbankan ini adalah penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang masih rendah.

Penurunan jumlah kredit yang dikucurkan oleh LKM kepada UKM berdasarkan bantuan dari perbankan. Jelas ini menunjukkan bahwa peran perbankan sangat lemah dalam menyalurkan bantuannya kepada LKM hal hal pendanaan operasional perkreditan, ini berakibat pada rendahnya penyaluran kredit dari LKM kepada UKM, dan dikawatirkan kurang bekerja secara maksimalnya UKM untuk terus berkembang dan menopang perekonomian di Indonesia.

Walaupun secara umum biaya atas dana pinjaman dari LKM lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan, namun dalam sisi prosedur/administrasi peminjaman, LKM (terutama untuk LKM non bank) memiliki beberapa keunggulan. Di antara keunggulan tersebut, misalnya tidak ada persyaratan agunan/jaminan seperti diberlakukan pada perbankan formal. Bahkan dalam beberapa jenis LKM, pinjaman lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelola LKM. Kemudahan lainnya adalah pencairan dan pengembalian pinjaman sangat fleksibel dan seringkali disesuaikan dengan *cashflow* peminjam.

Penurunan peranan perbankan terhadap perkembangan LKM dalam memaksimalkan peran UKM sebagai salah satu indikator untuk menopang ekonomi Indonesia disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah perbankan di Indonesia.

Penurunan jumlah perusahaan perbankan yang beroperasi di Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor diantara faktor tersebut adalah adanya krisis moneter pada tahun 2008 yang menerpa Indonesia. Beban berat krisis moneter tidak sanggup ditanggung oleh bank, sehingga likuidasi dan merger menjadi solusi untuk menjadikan perusahaan perbankan untuk tetap bertahan. Oleh sebab itulah kemampuan perbankan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat menjadi menurun.

Dalam skala yang lebih makro, keberadaan LKM di Medan dapat menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif. Menurut Krishnamurti (2003) peningkatan akses dan pengadaan sarana penyimpanan, pembiayaan dan asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan, melalui: (1) tingkat konsumsi yang lebih pasti dan tidak berfluktuasi, (2) mengelola risiko dengan lebih baik, (3) secara bertahap memiliki kesempatan untuk membangun aset, (4) mengembangkan kegiatan usaha mikronya, (5) menguatkan kapasitas perolehan pendapatannya, dan (6) dapat merasakan tingkat hidup yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Pentingnya kegiatan pengembangan keuangan mikro ini, membuat PBB pada tanggal 18 November 2004 telah mencanangkan tahun 2005, sebagai tahun kredit mikro internasional. Dalam rangka tahun kredit tersebut, Indonesia dipilih oleh PBB sebagai salah satu negara dari delapan negara yang dijadikan real model untuk membangun *microfinance* di dunia (Endri, 2008).

Menurut defenisi yang dipakai dalam *Micro Credit Summit* (1997) dalam Wijono (2004),kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Bank Indonesia mendefenisikan mikro kredit sebagai kredit yang diberikan kepada seluruh para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendefenisikan kredit mikro sebagai pelayanan kredit di bawah Rp. 50 juta.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro ini umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Asian Development Bank (ADB) mendefenisikan

LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposit*), kredit (*loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan agar masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro. Menurut Direktorat Pembiayaan (2004) LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin, baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut. Berdasarkan fungsinya, maka jasa keuangan mikro yang dilaksanakan oleh LKM memiliki keragaman yang luas yaitu dalam bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya.

Menurut Krishnamurti (2005), walaupun terdapat banyak defenisi keuangan mikro, namun secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai defenisi tersebut, yaitu:

1. Menyediakan berbagai jenis pelayanan keuangan

Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi.

2. Melayani Masyarakat Miskin

Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas.

3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel

Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

Berdasarkan bentuknya secara umum LKM dibagi menjadi tiga (Wijono, 2004; Direktorat Pembiayaan, 2004 dan Setyo, 2008) yaitu :

1. Lembaga formal seperti bank desa dan koperasi
2. Lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah
3. Sumber – sumber informal, misalnya melepas uang

Sementara Usman *et all* (2004) membagi LKM di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu :

1. LKM formal, baik bank maupun non bank
2. LKM non formal, baik berbadan hukum maupun tidak
3. LKM yang dibentuk melalui program pemerintah
4. LKM informal seperti rentenir dan arisan

PERMASALAHAN PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Menurut Salam (2002) pengembangan LKM di Indonesia pada umumnya menghadapi kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Permasalahan yang terdapat disekitar lembaga keuangan mikro, jika dikelompokkan akan tercermin sebagaimana penjelasan pada bagian dibawah ini.

LKM umumnya memiliki modal yang relatif kecil dan sulit untuk menambah modal apabila diperlukan karena kurangnya kesadaran pemilik mengenai pentingnya permodalan dalam mendukung perkembangan usaha maupun untuk menutup resiko kerugian serta kemampuan finansal pemilik yang sangat terbatas. LKM juga menghadapi kesulitan akses dana ke perbankan atau sumber – sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan dana dalam rangka pengembangan usaha maupun penanggulangan kesulitan likuiditas akibat mismatch.

Sebuah lembaga keuangan mikro secara rata – rata memiliki SDM yang rendah produktifitasnya karena tingkat pendidikan yang rendah, tidak adanya standar dalam sistem

rekrutment, jenjang karir yang tidak jelas, sistem penggajian dan bonus yang tidak memadai, dan kurangnya upaya peningkatan kemampuan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan. Hal – hal tersebut menyebabkan kualitas SDM lembaga keuangan mikro tidak memadai dan tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

Sebagian besar lembaga keuangan mikro tidak mampu mengembangkan produk – produk baru yang inovatif yang mampu meningkatkan daya saing dengan lembaga keuangan berskala besar dan dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Hal ini disebabkan karena umumnya lembaga keuangan mikro memiliki kualitas SDM yang rendah, dana yang terbatas untuk membiayai kegiatan riset dan pengembangan pasar, serta tidak memiliki strategi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Sebagian besar lembaga keuangan mikro termasuk BPR, belum memiliki perangkat teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasionalnya atau jika ada tidak mampu memanfaatkannya secara optimal karena keterbatasan SDM. Hal ini menyebabkan lembaga keuangan mikro tidak memiliki kemampuan akses terhadap informasi baik yang berasal dari internal lembaga maupun dari eksternal sehingga tidak mampu menyediakan informasi yang cepat, lengkap dan akurat khususnya dalam proses penyusunan rencana maupun pengambilan keputusan.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor – faktor internal dari lembaga keuangan mikro sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat pula beberapa permasalahan yang terdapat di lembaga keuangan mikro yang berasal dari luar lembaga.

Persaingan yang dihadapi berasal dari sesama lembaga keuangan mikro maupun dengan bank umum yang memiliki unit usaha kecil atau cabang di daerah pedesaan. Bank – bank ini memiliki status yang jelas, jaringan luas, berteknologi tinggi, mempunyai bagian riset dan pengembangan dengan jumlah modal yang besar.

Likuidasi beberapa bank umum diikuti dengan likuidasi/pembekuan kegiatan usaha beberapa BPR, menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun tajam dan disamping itu tidak adanya lembaga penjaminan simpanan (LPS) yang melindungi kekayaan nasabah yang ditiptikan kepada lembaga keuangan mikro.

Lemah bahkan tidak adanya jaringan merupakan suatu kelemahan besar yang dihadapi lembaga keuangan mikro. Lemahnya jaringan berarti bahwa jaringan ada namun tidak memberikan arti dan perubahan yang lebih baik kepada anggota – anggota jaringan tersebut.

Lembaga keuangan mikro yang berkembang di Indonesia belum seluruhnya didukung dengan ketentuan hukum dan sistem pengawasan/pembinaan yang memadai. Pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro yang berkembang di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi yang berbeda. Beberapa lembaga keuangan mikro (LDKP, LSM/KSm) belum mempunyai suatu pengaturan yang jelas. Dengan demikian perlu kiranya disusun suatu pengaturan yang mencakup seluruh jenis lembaga keuangan mikro yang ada saat ini.

Belum adanya standar pembinaan dan pengawasan yang baku untuk lembaga keuangan mikro dan ada beberapa lembaga keuangan mikro yang belum mempunyai lembaga pengawas, secara tidak langsung telah ikut menghambat perkembangan lembaga keuangan mikro. Pengawasan yang efektif merupakan alat kontrol bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi secara sehat sehingga dapat berkembang secara wajar dan sehat serta memperoleh kepercayaan masyarakat.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LABA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Laba merupakan penambahan bersih pada modal sendiri (owner equity) yang terjadi karena proses kegiatan perusahaan. Laba tersebut dihitung dari hasil pengurangan pendapatan terhadap beban/ biaya.

Menurut Donald E, Kieso, dkk (2001:153) faktor – faktor yang mempengaruhi laba yaitu:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva entitas atau pelunasan kewajibannya (kombinasi keduanya) selama satu periode, yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

b. Beban/ biaya

Beban adalah arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas atau penambahan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode, yang ditimbulkan oleh pengiriman dan produksi barang, penyedia jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

c. Keuntungan

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi sampingan atau insidental kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.

d. Kerugian

Kerugian adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi sampingan atau insidental kecuali yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik.

e. Konsep Laba

Menurut Sofyan Syafri (2001:265) ada empat konsep laba yang biasa digunakan oleh suatu perusahaan:

1. Money Maintenance, yaitu financial Capital
2. General Purchasing Power Money Maintenance
3. Productive Capacity Maintenance
4. General Purchasing Power, Productive Capacity Maintenance

Kutipan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Money Maintenance, yaitu financial Capital

Menurut konsep ini modal ditanamkan oleh pemilik tetap terpelihara. Laba menurut konsep ini adalah perubahan *net asset* dengan menyesuaikan transaksi modal yang dijabarkan dalam ukuran uang. Konsep ini sama dengan konsep yang dianut dalam akuntansi konvensional.

2) General Purchasing Power Money Maintenance

Menurut konsep ini, tenaga beli dari modal yang diinvestasikan pemilik tetap dipertahankan sehingga menurut konsep ini laba adalah perubahan *net asset* setelah disesuaikan transaksi modal yang diukur dengan tenaga beli yang sama. Konsep ini sama dengan GPLA (*General Price Level Adjusted*) *Historical Cost Accounting*.

3) Productive Capacity Maintenance

Menurut konsep ini, kapasitas produksi perusahaan dipertahankan, kapasitas produksi dapat diartikan sebagai kapasitas fisik, kapasitas untuk memproduksi, (volume) barang dan jasa yang sama dan kapasitas/ memproduksi nilai barang dan jasa yang sama. Konsep ini sama dengan *Current Value Accounting*.

4) General Purchasing Power, Productive Capacity Maintenance

Yaitu physical capital yang diukur dengan unit tenaga beli yang sama. Menurut konsep ini kapasitas produksi fisik perusahaan yang diukur dalam unit tenaga beli yang sama dipertahankan.

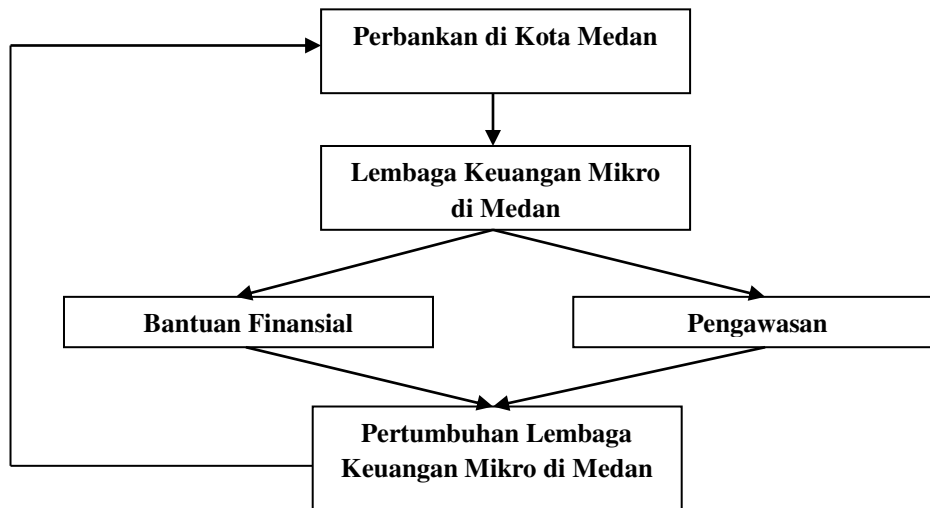
KERANGKA KONSEPTUAL

Perbankan merupakan salah satu pilar ekonomi yang harus dimiliki. Perkembangan perbankan secara signifikan diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan pula

terhadap perkembangan lembaga keuangan mikro. Harapan ini beralasan, bahwa kondisi riil mikro ekonomi yang digerakan oleh usaha kecil dan menengah (UKM).

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki centra – centra usaha kecil dan menengah, yang secara permodalan masih sangat butuh bantuan. Oleh sebab itu, bantuan dari lembaga keuangan mikro yang secara prosedural pemberian bantuan pinjaman tidak terlalu rumit sangat dibutuhkan.

Dengan demikian aktivitas lembaga keuangan mikro harus mendapatkan dukungan dari dunia perbankan yang ada di Medan. Untuk lebih mudah memahami kerangka konseptual penelitian ini, dapat dilihat pada gambar berikut ini :



HIPOTESIS

Ha₁ = Variabel Penyaluran Dana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan laba Lembaga Keuangan Mikro.

Ha₂ = Variabel Penyaluran Dana tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan laba Lembaga Keuangan Mikro.

METODOLOGI PENELITIAN

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan dan LKM yang beroperasi di Kota Medan. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu dengan mengambil sampel perusahaan selama periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Menyajikan data laporan laba rugi pada periode pengamatan yaitu tahun 2008 sampai dengan 2010.
2. Menerima pinjaman kredit dari pihak bank umum atau bank perkreditan rakyat.

OPERASIONAL VARIABEL

Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengukur peranan perbankan terhadap Lembaga Keuangan Mikro adalah :

1. Penyaluran jumlah kredit Perbankan kepada LKM (X)

Variabel ini merupakan besarnya jumlah penyaluran kredit dari bank atau perbankan kepada lembaga seperti Koperasi, BMT dan lembaga keuangan mikro lainnya.

2. Laba Operasional LKM (Y)

Untuk melihat perkembangan dari LKM dapat diukur dengan dilihat dengan Laba Operasional LKM itu sendiri. Semakin besar laba yang diperoleh akan semakin mudah LKM untuk berkembang.

ASUMSI KLASIK

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis sebelumnya dilakukan asumsi klasik dengan menggunakan regresi linier berganda, pengujian asumsi klasik penting dilakukan agar diperoleh parameter yang valid dan handal. pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas, Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk melihat distribusi data normal atau tidak yaitu analisa statistik. Uji normalitas dengan grafik dapat menyedatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal. Uji normalitas statistik ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. (Wahid Sulaiman, 2004, hal.90)

Uji Gejala Autokorelasi, Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang saling berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada runtun waktu (time series) karena gangguan pada seorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang sama periode berikutnya.

Uji gejala Heteroskedastisitas, Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak menjadi heteroskedastisitas.

**HASIL DAN ANALISIS
DESKRIPSI DATA**

**Tabel 1
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_PenyaluranKredit	49	12.68	19.27	16.8808	1.71864
LN_LabaLKM	49	7.10	16.26	13.0449	2.62151
Valid N (listwise)	49				

Table 1 menunjukkan jumlah data adalah sebesar 49. Jumlah data ini merupakan jumlah data akhir setelah dilakukan penormalan data. Jumlah data sebesar dinormalkan adalah sebanyak 54 data yang berasal dari 18 data perusahaan bank dan koperasi dimana

tahun pengamatan adalah sebanyak 3 tahun. Dengan demikian jelas bahwa data yang digunakan adalah time series. Jumlah data sebesar 54 dikurangi data yang dihapus karena adanya penormalan data sehingga total data yang digunakan menjadi sebesar 49 (data yang dihapus terlampir pada penelitian ini). Sedangkan nilai minimum pada variabel penyaluran dana adalah sebesar 12,68 ini menunjukkan bahwa tingkat penyaluran dana perbankan kepada Lembaga Keuangan Mikro adalah hanya sebesar 12%, sedangkan penyaluran maksimumnya adalah sebesar 19,27, dengan demikian penyaluran maksimal yang diberikan perbankan kepada Lembaga Keuangan Mikro adalah hanya 19,27%. Penyaluran ini terbilang sangatlah kecil. Dengan melihat rata – rata pada variabel penyaluran dana didapatkan hanya sebesar 16,88% saja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyaluran dana perbankan kepada Lembaga Keuangan Mikro sangat kecil sekali. Artinya bahwa peranan yang harus dibangun lembaga keuangan mikro sebagai salah satu pilar penopang ekonomi bangsa perlu ditingkatkan karena dirasa sangat rendah dari yang diharapkan.

Selanjutnya pada laba yang diperoleh oleh Lembaga Keuangan Mikro menunjukkan bahwa tingkat minimal laba yang diperoleh hanyalah sebesar 7,10% saja dibila diukur dengan penyaluran dana perbankan. Sedangkan nilai maksimal perolehan laba LKM adalah sebesar 16,26% saja. Nilai perolehan laba ini merupakan perolehan yang sangat kecil sekali. Sedangkan rata – rata dari variabel laba LKM adalah sebesar 13,04% nilai yang sangat rendah. Dengan demikian berdasarkan pada table 4.5 ini dapat dinyatakan sementara bahwa peranan perbankan terhadap perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan terbilang sangat rendah.

ANALISIS REGRESI

Berdasarkan pada tabel 4.8 maka dapat disusun model penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 14.421 - 0,082X$$

Dilihat dari persamaan linear tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan variabel Penyaluran dana adalah linear negatif terhadap peningkatan laba LKM. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linear sederhana diatas dapat diartikan sebagai berikut :

Jika Penyaluran data diasumsikan sama dengan nol maka laba operasional LKM bernilai sebesar 14.421. Jika penyaluran dana ditingkatkan sebesar 1% maka akan diikuti dengan penurunan laba operasional sebesar 0,082%.

Hubungan ini terjadi dapat terjadi, mengingat jika pihak perbankan menyalurkan dananya kepada LKM, maka sudah pasti LKM harus memberikan imbalan dalam bentuk bunga. Dengan mempertimbangkan anggota dari LKM yang kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membayar akan menjadikan beban bagi LKM itu sehingga laba operasional dapat berkurang.

PEMBAHASAN

Sebagai salah satu pilar penting kegiatan ekonomi, keberadaan lembaga keuangan khususnya perbankan di Kota Medan dirasakan penting dan strategis khususnya untuk mendukung ketersediaan modal, baik yang bersifat modal investasi, modal kerja, maupun modal konsumsi. Rusaknya system perbankan nasional sebagai akibat krisis ekonomi dan moneter ternyata tidak sampai menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat Kota Medan terhadap lembaga keuangan perbankan.

Peran bank dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Medan sangat penting artinya. Untuk mendukung pemerintah dan memperlancar bank yang ada di Kota Medan telah menyalurkan kredit yang cukup besar. Sampai dengan bulan Desember 2006 posisi pinjaman menurut lapangan usaha sebesar 26.562 Milyar Rupiah, yang terdiri dari 3.283 Milyar untuk lapangan usaha Pertanian, 8.003 Milyar untuk Industri, 6.454 Milyar untuk Perdagangan dan selebihnya untuk Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Angkutan, Jasa Perusahaan, Jasa Sosial, dan Lapangan Usaha lainnya.

Hingga saat ini terdapat sekitar 40 bank yang beroperasi di kota Medan yang meliputi bank umum nasional, bank umum internasional, bank devisa serta bank perkreditan rakyat (BPR). Sebagian besar kantor wilayah/kantor cabang bank – bank yang beroperasi di Sumatera Utara berada di Kota Medan.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa perbankan yang melakukan penyaluran kredit atau bantuan dana terbesar kepada LKM adalah pada Bank Rakyat Indonesia yaitu pada tahun 2010 menyalurkan kredit sebesar Rp. 232.976.674. Selain memberikan penyaluran kredit yang besar, Bank Rakyat Indonesia juga memiliki trend peningkatan dalam penyaluran kreditnya dimana pada tahun 2008 memberikan penyaluran dana sebesar Rp. 153.102.630 sedangkan pada tahun 2009 Bank Rakyat Indonesia menyalurkan dana sebesar Rp. 196.754.420. Trend peningkatan penyaluran dana ini sangat baik bagi perkembangan Lembaga Keuangan Mikro, bukan hanya pada lembaga LKMnya saja tetapi juga akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Terdapat perusahaan perbankan yang memberikan penyaluran dana yang paling kecil. Penyaluran terkecil diberikan oleh Bank Eksekutif Internasional dimana pada tahun 2010 hanya memberikan penyaluran dana sebesar Rp. 321.343. Bahkan penyaluran dana ini menunjukkan trend penurunan. Dimana pada tahun 2008 penyaluran dana yang diberikan sebesar Rp. 919.627 sedangkan pada tahun 2009 penyaluran dana yang diberikan sebesar Rp. 929.313. Jika demikian, sangat jelas bahwa Bank Eksekutif Internasional pada dasarnya sangat kurang mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memaksimalkan peran dari sektor mikro.

Table 4.4 menunjukkan bahwa terdapat LKM dalam hal ini adalah koperasi yang tercatat di Medan yang memiliki tingkat laba operasional yang cukup besar. Koperasi yang memiliki laba operasional terbesar adalah pada Koperasi Kopkar Adhiguna PT. Adhiguna dimana jumlah laba operasional yang diperoleh pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 11.472.385. Bahkan Kopkar Adhiguna PT. Adhiguna mengalami trend peningkatan laba operasional, dimana pada tahun 2008 laba operasional yang diperoleh adalah sebesar Rp. 5.958.368, pada tahun 2009 terjadi peningkatan laba operasional kembali menjadi sebesar Rp. 7.308.292. Sedangkan koperasi yang mengalami trend penurunan laba operasional adalah pada koperasi Primkopad Matdam II/BB dimana pada tahun 2008 koperasi hanya mendapatkan laba operasional sebesar Rp. 3.111 pada tahun 2009 terdapat peningkatan laba sebesar Rp. 3.988 tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 1.212

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa Peranan perbankan terhadap peningkatan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan tidak ada, atau dengan kata lain sangat tidak signifikan. Indikator yang digunakan adalah jumlah penyaluran kredit yang dikucurkan oleh perbankan kepada Lembaga Keuangan Mikro dalam hal ini adalah koperasi yang terdata di Kota Medan.

Hasil ini menunjukkan bahwa penyaluran dana dalam bentuk kredit tidak membuktikan bahwa peranan perbankan sangat besar terhadap perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan. Sebab permasalahan utama Lembaga Keuangan Mikro secara modal mungkin telah teratasi dengan bantuan kucuran dana dari perbankan. Namun

permasalahan substansial terhadap permasalahan utama dari Lembaga Keuangan Mikro itu sendiri belum bias terjawab dengan baik.

Faktor Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan LKM itu sendiri belum terselesaikan. Dinilai sebagai lembaga nomor 2 yang tidak memiliki prospek menjadi hal yang perlu diperhatikan sebab banyak orang yang memiliki kemampuan lebih memilih perbankan daripada Lembaga Keuangan Mikro yang dikelolanya. Karena hal SDM ini sehingga tidak tercipta model pemasaran yang baik untuk merekut nasabah atau anggota koperasi itu sendiri.

Selanjutnya, dikarenakan koperasi ini adalah Koperasi Karyawan, maka tidak terlepas adanya intervensi dari pimpinan lembaga dimana koperasi itu berdiri, sehingga menyulitkan bagi pengurus koperasi untuk membuat kebijakan yang dapat mengembangkan koperasi itu sendiri. Permasalahan lain yang mungkin saja mengganggu adalah jaringan koperasi yang terbatas sehingga mengalami kesulitan untuk dapat meningkatkan jumlah anggota atau nasabahnya.

-

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menarik kesimpulan bahwa Perbankan memiliki peranan yang tidak signifikan terhadap perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan.

Jumlah rata – rata pemberian penyaluran kredit kepada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan sebesar 16,88%, jumlah dinilai sangat kecil untuk meningkatkan sumber permodalan bagi Lembaga Keuangan Mikro.

Jumlah rata – rata perolehan laba operasional Lembaga Keuangan Mikro yang hanya sebesar 13,04% menunjukkan rendahnya kemampuan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan untuk berkembang jika dilihat dari sisi penyaluran dana yang diberikan oleh perbankan.

Hasil uji t menunjukkan dimana nilai signifikansi sebesar 0,715 lebih besar dari nilai alphanya yang sebesar 0.05. memberikan arti bahwa Perbankan memiliki peranan yang tidak signifikan terhadap perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan.

Hasil perhitungan uji determinan hanya sebesar 0,3% variabel penyaluran dana perbankan mampu menjelaskan laba operasional Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan, sedangkan sisanya sebesar 99,7% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya dan kesimpulan pada bab ini, maka dapat diberikan beberapa saran.

Kepada Perbankan yang telah mengucurkan penyaluran dana kepada Lembaga Keuangan Mikro, sebaiknya tidak melepaskan begitu saja. Artinya bahwa pengawasan atas penggunaan dan pengembalian dana yang sudah dikucurkan tersebut, benar – benar sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan sehingga Lembaga Keuangan Mikro dapat berjalan dengan baik cash flow yang ada padanya. Cash Flow yang dapat dilihat pada Lembaga Keuangan Mikro adalah aliran uang tunai yang masuk kepada Lembaga Keuangan Mikro, dari anggota yang membayar kewajibannya serta aliran uang tunai keluar dari Lembaga Keuangan Mikro karena harus membayar kewajiban atau memberikan pinjaman kepada anggota.

Perhatian Lembaga Keuangan Mikro jangan hanya terfokus bagaimana Perbankan memberikan sumber dana yang besar, tetapi juga harus memiliki pola dan cara pemasaran yang baik untuk mengelola dana yang telah dikucurkan oleh perbankan. Beberapa cara pemasaran yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk tim pemasaran yang bertugas

untuk berkeliling mencari anggota atau pengusaha mikro yang membutuhkan data secara door to door sekaligus melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada pihak yang akan menjadi calon anggotanya.

Kepada peneliti berikutnya, untuk melihat peranan perbankan terhadap Lembaga Keuangan Mikro, perlu melengkapi indikator – indikator lainnya selain indikator penyaluran dana. Contoh indikator yang dapat digunakan adalah Sumber Daya Manusia, Metode Pemasaran, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2000. *Analisis Regresi Teori, Kasus, dan Solusi*, Yogyakarta: BPFE.
- Bahroen, Syahrul, 2004. *Refleksi Kebijakan Keuangan Mikro 2003 dan Strategi Pengembangan Keuangan Mikro 2004 (Belajar dari Pengalaman BPR)*, Paper Rapat Majelis Gema PKM Indonesia, 28 Januari 2004
- Burhanuddin, Abdullah, 2006. *Menanti Kemakmuran Negeri, Kumpulan Essai Tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Pembiayaan, 2004. *Kelembagaan dan Pola Pelayanan Keuangan Mikro Untuk Sektor Pertanian (Pedoman dan Kebijakan)*, Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Endri, 2008. *Analisis Peran Perbankan Dalam Pengembangan Keuangan Mikro*, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 29 No. 13 Agustus 2008, Jakarta: Universitas Perbanas.
- Ghozali, Imam, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Universitas Diponegoro.
- Ihwan Susila, 2007. *Analisis Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8 No. 2 Desember 2007, Surakarta: Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surakarta.
- Krishnamurti, B, 2005. *Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat*. Edisi IV Maret 2005.
- Salam, Abdul, 2002. *Perkembangan dan Prospek Layanan Jasa Perbankan Pada Micro Finance*, *Majalah Pengembangan Perbankan*, September-Oktober No, 85.p.28-33.
- Setyo Budiantoro, 2003. *RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat*, *Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II*, Nomor 8, Nopember 2003, Yogyakarta.
- Sudaryanto, T. dan M. Syukur, 2002. *Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Hlm. 101-121.
- Sudaryanto, dkk. *Analisis Kebijaksanaan: Pendekatan Pembangunan dan Kebijaksanaan Pengembangan Agribisnis. Monograph Series No. 22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*.
- Usman S., dkk, 2004. *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin; Pengalaman Nusa Tenggara Timur*, Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Wijono W, 2004. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan Kajian Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus)*. Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Jakarta: Departemen Keuangan.